

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

**MEMORANDUM**  
Nomor 354/BRSDM.2/TU.140/X/2023

Yth. : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP  
Dari : Kepala Pusat Riset Kelautan (Pusriskel)  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Pusriskel Triwulan III Tahun 2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 19 Oktober 2023

---

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun 202, maka perlu disusun pelaporan kinerja organisasi Pusat Riset Kelautan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
secara elektronik**

Hendra Yusran Siry

Tembusan :  
- Sekretaris BRSDM



# LAPORAN KINERJA

## PUSAT RISET KELAUTAN

### TRIWULAN III

# 2023

**Pusat Riset Kelautan  
Badan Riset dan SDM KP**

# Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Izin dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan III Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance*.

Laporan ini menyajikan kinerja organisasi Pusat Riset Kelautan selama Triwulan III Tahun 2023. Metode penyajian kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi capaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan III Tahun 2023 dan diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pusat Riset Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Kelautan - BRSDM telah menerapkan metode pengukuran kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC). Kinerja Pusat Riset Kelautan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja (IK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagai dokumen kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja Level 2 Pusat Riset Kelautan Triwulan III Tahun 2023 yang meliputi capaian kinerja kegiatan lingkup Pusat Riset Kelautan (Pusriskel). Capaian kinerja tersebut dikontribusi oleh 3 satuan kerja (satker) yang berada di lingkup Pusriskel yaitu satker Pusriskel, satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) – Bungus, dan satker Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) – Wakatobi.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan III Tahun 2023. Akhirnya, semoga laporan ini memberikan manfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan dan tahun berikutnya.

Jakarta, 15 Oktober 2023

**Kepala Pusat Riset Kelautan**



**Ditandatangani  
secara elektronik**

**Hendra Yusran Siry**

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Ringkasan Eksekutif .....	vii
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi .....	5
C. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM).....	9
D. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
A. Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024 .....	14
B. Potensi dan Permasalahan .....	18
C. Rencana Kerja Tahunan 2023.....	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	22
E. Pengukuran Kinerja .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>27</b>
A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023.....	28
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	28
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023.....	46
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Capaian Kinerja Utama .....	52
B. Permasalahan dan Rekomendasi .....	53
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>54</b>



# Daftar Gambar

<b>Gambar 1.</b> Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.....	3
<b>Gambar 2.</b> Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan .....	10
<b>Gambar 3.</b> Satker UPT Pusriskel.....	19
<b>Gambar 4.</b> Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023.....	21
<b>Gambar 5.</b> Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2023. ....	21
<b>Gambar 6.</b> Indeks Capaian IK.....	24
<b>Gambar 7.</b> Nilai Capaian Kinerja Pusriskel tahun 2023 .....	28
<b>Gambar 8.</b> Nilai Efisiensi anggaran Triwulan III Tahun 2023.....	49

# Daftar Tabel

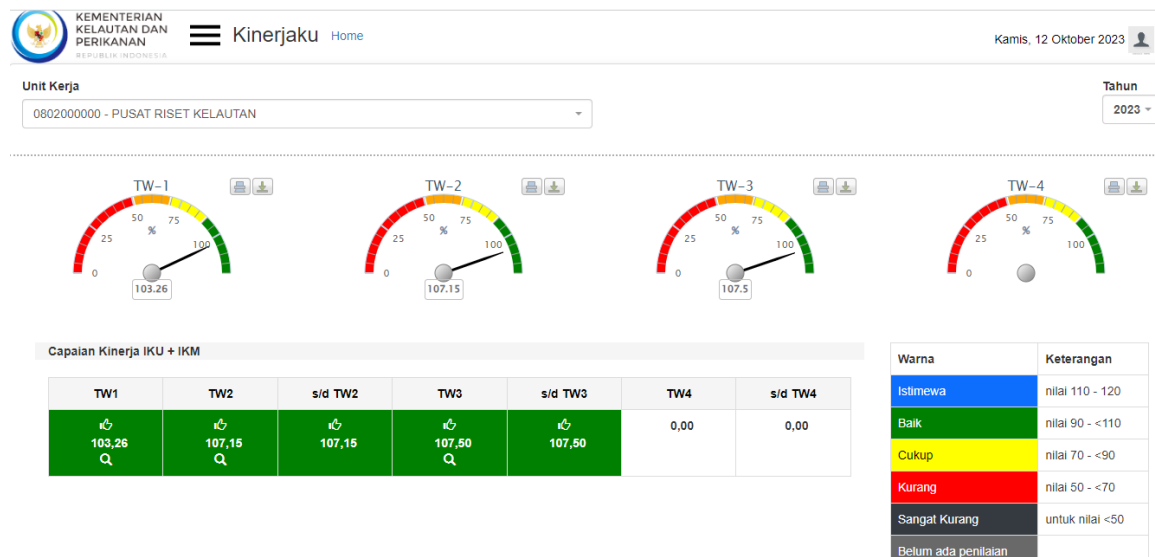
<b>Tabel 1.</b> Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan .....	10
<b>Tabel 2.</b> Sasaran Kegiatan Pusriskel .....	15
<b>Tabel 3.</b> Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 .....	15
<b>Tabel 4.</b> Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 .....	22
<b>Tabel 5.</b> Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK.....	25
<b>Tabel 6.</b> Nilai Indeks Status Capaian NPSS.....	25
<b>Tabel 7.</b> Standar Status Kinerja NPSS.....	26
<b>Tabel 8.</b> Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan III Tahun 2023.....	29
<b>Tabel 9.</b> Capaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%).....	33
<b>Tabel 10.</b> Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan III Tahun 2023 .....	34
<b>Tabel 11.</b> Capaian IK Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%) ...	41
<b>Tabel 12.</b> Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).....	42
<b>Tabel 13.</b> Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Triwulan III Tahun 2023.....	46
<b>Tabel 14.</b> Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023.....	47
<b>Tabel 15.</b> Perhitungan Efisiensi Anggaran Pusat Riset kelautan .....	49
<b>Tabel 16.</b> Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan III Tahun 2023 .....	52



# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja Pusriskel yang terukur atas capaian kerjanya pada Triwulan III Tahun 2023 dan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kerjanya pada periode berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced ScoreCard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu aplikasi Kinerjaku pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja pada aplikasi tersebut diperoleh nilai capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 107,50% dengan kategori baik dan disajikan dengan indikator warna hijau sebagaimana gambar berikut.



Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, dari 14 Indikator Kinerja Pusriskel, terdapat 3 Indikator Kinerja yang telah memiliki capaian dengan Indikator Kinerja capaian berwarna hijau dan biru atau telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Capaian Kinerja ketiga Indikator Kinerja Pusriskel tersebut pada Triwulan III Tahun 2023 sebagai berikut:



1. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan dengan target sebesar 100% dan memiliki capaian sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100% (hijau);
2. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan dengan target sebesar 92% dan memiliki capaian sebesar 133,33 %, sehingga persentase capaiannya adalah 120% (biru);
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan dengan target sebesar 75% dan memiliki capaian sebesar 75 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100% (hijau);

Capaian kinerja Pusat Riset Kelautan selama Triwulan III Tahun 2023 sudah baik (diatas 100%) dan dicerminkan dengan indikator berwarna hijau, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja (IK) dengan Capaian Triwulan Melampaui Target Tahunan  
Terdapat 1 Indikator Kinerja dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan. Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada periode triwulan berikutnya.
2. Indikator Kinerja (IK) dengan Target Tahunan  
Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dipantau perkembangan capaian pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa target kinerja akhir tahun yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* Pusriskel. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Pusriskel.



# **Bab I   Pendahuluan**

- A.   Latar Belakang**
- B.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- C.   Keragaan SDM**
- D.   Sistematika Laporan Kinerja**



## A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK, Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja ini mencerminkan bahwa setiap penyelenggara negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh program/ kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Penerapan akuntabilitas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan peraturan tersebut, Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sebagai implementasi dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas hasil penyelenggaraan kegiatan dan anggaran dimaksud maka Pusriskel menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan acuan dalam perencanaan kinerja didasarkan pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021- 2024 dan Rencana Strategis BRSDM Tahun 2021-2024.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama arahan Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.



Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Tujuh Agenda Pembangunan:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 menjabarkan agenda pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden tersebut dan diwujudkan dalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mengedepankan pembangunan ekonomi biru, dimana ekologi menjadi ujung tombak dalam mengelola kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 5 (lima) program prioritas KKP sebagai perwujudan kebijakan ekonomi biru yang mencakup (1) perluasan kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (3) pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, (4) pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, dan (5) penanganan sampah plastik di laut.

Renstra KKP menjelaskan bahwa Visi KKP didasarkan pada Visi Indonesia 2024 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

### **Visi dan Misi**

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi BRSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Pusriskel mengacu pada visi BRSDM dan KKP:

**Visi** *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”*

Misi Pusriskel adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, Pusriskel mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP dan BRSDM. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusriskel, yaitu:

1. Misi Ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan;
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan;
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan;
4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Pusat Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan III Tahun 2023 ini adalah:

1. Mengukur capaian kinerja IKK yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Triwulan III Tahun 2023;
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKK pada Triwulan III Tahun 2023;
3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada Triwulan III Tahun 2023.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan III Tahun 2023;
2. Menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya.

## **B. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;

- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan dalam menjalankan ketenaganukliran serta keantariksaan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Bab VII tentang Pengintegrasian, Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa:

- (1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.
- (2) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu Kementerian/ Lembaga (K/L) yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan penelitian, pengembangan dan penerapan beserta Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran pendukungnya sebelum terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Sebagai implementasi amanah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 maka pada tahun 2022 KKP telah melakukan serangkaian langkah sebagai tindaklanjutnya. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh KKP diantaranya adalah:

- 1. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagai sebuah unit kerja Eselon I di lingkungan KKP sudah tidak

menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan;

2. KKP melaksanakan serah terima alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari BRSDMKP kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Kamis, 27 Oktober 2022, di Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Denpasar, Bali;
3. Pengalihan SDM Riset KKP ke BRIN berjumlah 529 orang terdiri atas 367 orang peneliti, 81 orang perekayasa dan 81 orang teknisi litkayasa dan telah dilantik menjadi jabatan fungsional periset di BRIN. Khusus dari BRSDM, SDM yang pindah ke BRIN berjumlah 443 orang.
4. Pemandahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN.

Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BRSDMKP, KKP pada tahun anggaran 2022 sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan. Pada bulan November 2022 Pusriskel telah memproses revisi DIPA ke-7 terkait pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN. Oleh karenanya sejak tahun 2022, Pusriskel sudah tidak memiliki IK terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan.

Secara kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, lingkup Pusriskel terdapat 3 (tiga) satuan kerja, yaitu 1) Pusat Riset Kelautan-Jakarta; dan 2 UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Pusriskel, yakni 1) Loka Riset Sumberdaya Kerentanan Pesisir (LRSDKP)-Bungus, Sumatera Barat (PermenKP No. 28 Tahun 2020); dan 2) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK)-Wakatobi, Sulawesi Tenggara (PermenKP No. 85 Tahun 2020); serta Instalasi Pengelolaan Sumberdaya Air Laut (IPSAL)-Madura, Jawa Timur; Unit Rintisan Teknologi Kelautan (PIAMARI)-Pangandaran, Jawa Barat dan calon UPT MIAMARI-Morotai, Maluku Utara.

Untuk membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Riset Kelautan tersebut, maka Kepala Pusat Riset Kelautan telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor B.4.1/BRSDM.2/KP.440/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 untuk memberikan perintah melaksanakan tugas sebagai Ketua Kelompok Indikator Kinerja Kegiatan, Penanggung Jawab IKK, dan Anggota, pada Pusat Riset Kelautan di samping jabatan fungsionalnya. Per 1 Agustus 2023 telah diterbitkan Surat Perintah Nomor B.821/BRSDM.2/KP.440/VIII/2023 menggantikan Surat Perintah sebelumnya untuk menjadi Ketua dan/atau anggota Tim Kerja sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja dan tugasnya, yakni:



**A. Tim Kerja SDM Aparatur dan Umum, mempunyai tugas:**

1. Koordinasi dan pelaksanaan Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengelolaan Unit Rintisan (PIAMARI, MIAMARI, Lab. Pasar Minggu, Lombok, Saumlaki, Natuna); Pengelolaan Sarana Perkantoran (Ancol); Pengelolaan BMN; Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan; Pengelolaan PBJ operasional kantor; Penatausahaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan Pimpinan; Penatausahaan pertemuan pimpinan; Pengelolaan Urusan rumah tangga; Pengelolaan *Whistle Blower*; Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest/ COI*); Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); Penatalaksanaan SOP, Surat Keputusan, Surat Perintah, dan Naskah Akademik.
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan manajemen SDM aparatur lingkup Pusat Riset Kelautan.
3. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan proposal PNBP, pembinaan penatalaksanaan PNBP UPT, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNBP.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

**B. Tim Kerja Keuangan, mempunyai tugas:**

1. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN, Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN, dan Penyusunan Laporan PIPK dan SPIP.
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, Penatausahaan kontraktual, Pembayaran tagihan kontraktual dan non kontraktual.
3. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan Laporan Capaian Output, Penyusunan Laporan Serapan Anggaran, dan Input Aplikasi SMART-DJA.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

**C. Tim Kerja Program, mempunyai tugas:**

1. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program, anggaran, dan kinerja serta revisi dokumen perencanaan, Penilaian mandiri SAKIP, Pemenuhan dokumen SAKIP lainnya, Penyusunan laporan evaluasi SAKIP, Koordinasi dan pelaksanaan revisi anggaran.
2. Koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Penyusunan laporan kinerja (LKj), Penyusunan laporan satuan kerja, Pelaksanaan

rekonsiliasi capaian kinerja, Penilaian mandiri rekonsiliasi kinerja, Pemenuhan dokumen rekonsiliasi kinerja lainnya.

3. Koordinasi dan pelaksanaan Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut, Pendampingan Pelaksanaan pengawasan APIP, dan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pmpinan.

#### **D. Tim Kerja Pelayanan Teknis, mempunyai tugas:**

1. Inisiasi, koordinasi, dan pelaksanaan kerjasama, Telaah dokumen kerjasama, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama, Penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama, Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SFV, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SFV, Penyusunan laporan pelaksanaan SFV
2. koordinasi dan pelaksanaan Pengelolaan: Bitrix, Data dan Informasi, Jurnal, Sistem Informasi, Command Center, dan PPID.
3. Koordinasi, pendampingan, penyiapan dan penerapan Layanan Publik, Pelayanan Konsultasi bagi masyarakat Umum, Persiapan menuju WBK, Pendampingan Penerapan Pelayanan Publik, Pengelolaan Media Sosial, Podcast, Layanan design grafis/ flyer/ konten creator dan dokumentasi kegiatan, Diseminasi/ pameran/ fasilitasi peliputan berita.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pmpinan.

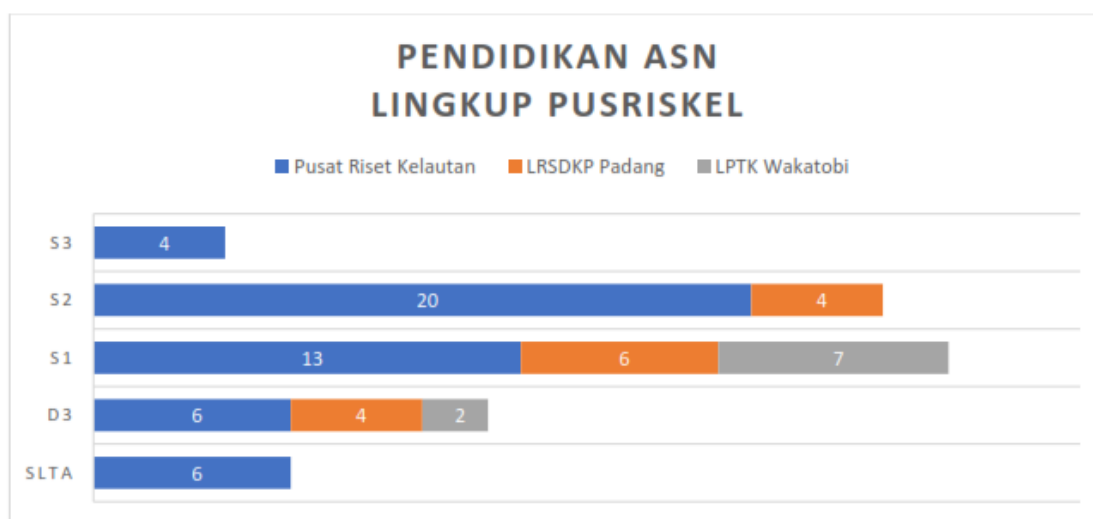
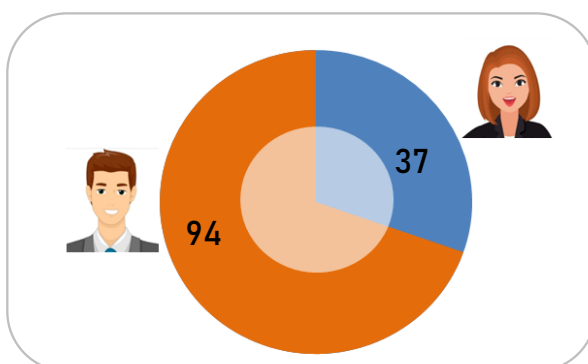
#### **E. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pada Triwulan III Tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah pegawai memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), pengangkatan PPPK pada Pusat Riset Kelautan dan LPTK, Wakatobi, perpindahan pegawai dari AK Wakatobi ke Pusat Riset Kelautan dan perpindahan pegawai Non ASN dari Pusat Riset Kelautan ke Biro Hukum, KKP. Sehubungan dengan perubahan data tersebut, distribusi pegawai pada Pusat Riset Kelautan dan UPT dibawahnya berdasarkan jenis kelamin, sebaran Pendidikan dan jabatan fungsional kami sampaikan dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan

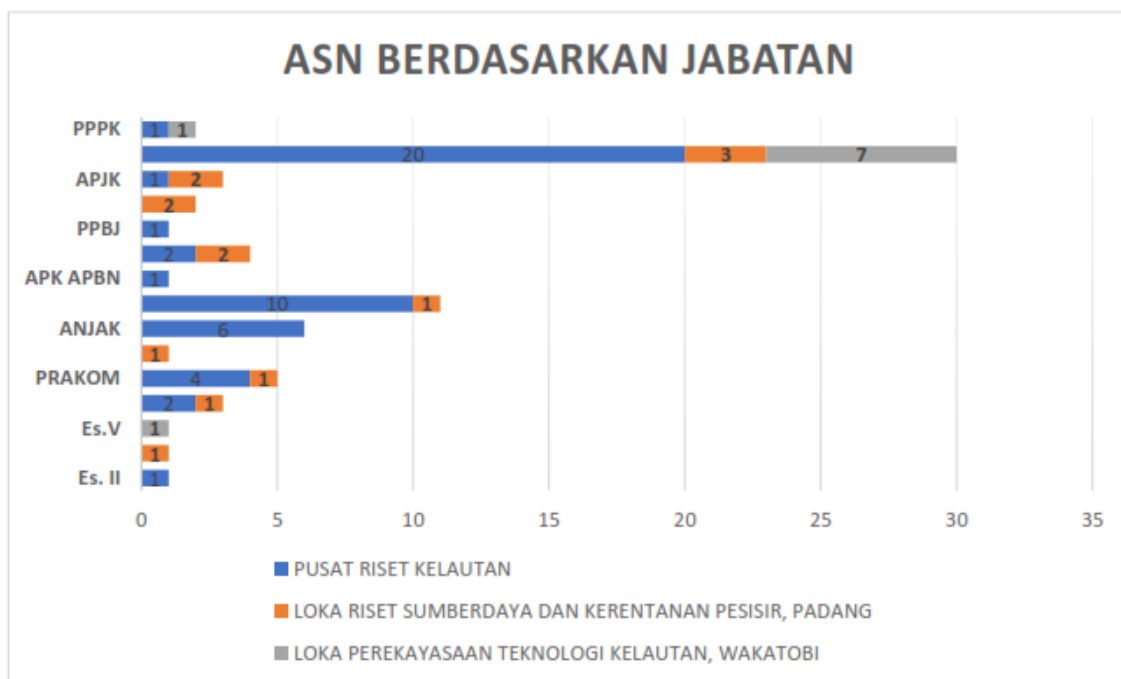
Jenis Kelamin Berdasarkan Satker dan Jenis Kepegawaian	PNS		KONTRAK		Jumlah
	L	P	L	P	
PRK	34	15	16	10	75
LRSDKP	10	4	16	3	33
LPTK	8	1	10	4	23
<b>JUMLAH</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>131</b>

Terdapat penambahan 1 orang pegawai PPPK di Pusriskel pada Triwulan III ini, sehingga total pegawai adalah 131. Dari 131 pegawai tersebut terdapat satu pegawai yang tugas belajar dan satu pegawai yang berstatus dipekerjakan di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan gender pegawai adalah sebanyak 71.76 % dan 28.24% untuk laki-laki dan perempuan.



Gambar 2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Gender dan Pendidikan

Dari data pegawai berdasarkan Pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan yang mendominasi adalah S1 sebanyak 26 orang atau 36.11 % dan S2 sebanyak 24 orang atau 33.33%. Selain data tersebut masih terdapat satu Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar, dan tujuh pegawai yang sedang menjalankan izin belajar. Tugas dan izin belajar tersebut nantinya akan meningkatkan kompetensi pegawai melalui Pendidikan.



Gambar 3. Sebaran Pegawai berdasarkan jabatan

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada lingkup Pusat Riset Kelautan yang menduduki jabatan sebagai pejabat struktural berjumlah 3 orang pegawai yang terdiri dari 1 struktural eselon II a/ Kepala Pusat, dua struktural eselon V / Kepala UPT. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional berjumlah 69 orang, yang terdiri dari masing-masing jabatan fungsional antara lain: Analis Kebijakan, Perencana, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas, Analis Kepegawaian, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, PPBJ, Instruktur dan APJK. Sedangkan yang menduduki jabatan fungsional umum berjumlah 25 pegawai.

## F. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

- **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, dan capaian kinerja serta kendala selama Triwulan III Tahun 2023;
- **Bab I – Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang unit kerja Pusat Riset Kelautan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusat Riset Kelautan;
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis Pusat Riset Kelautan pada TA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja tahunan Tahun 2023 serta pengukuran kinerja;
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan III Tahun 2023:
  - a) Capaian Kinerja Organisasi
    - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2023;
    - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2022;
    - Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional; (jika ada);
    - Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
    - Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
    - Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
  - b) Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan dan seluruh UPT.
- **Bab IV - Penutup**, menyajikan uraian singkat kesimpulan terhadap pencapaian kinerja di Triwulan III Tahun 2023 serta Permasalahan dan Rekomendasi.
- **Lampiran:**
  - a) Perjanjian Kinerja Pusriskel TA 2023;
  - b) Lain-lain yang dianggap perlu.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Renstra Pusriskel 2020 -2024**
- B. Rencana Kerja Tahunan 2023**
- C. Perjanjian Kinerja TA 2023**
- D. Potensi & Permasalahan**
- E. Pengukuran Kinerja**

## A. Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pusriskel berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis BRSDMKP Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra BRSDM, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (Renstra BRSDM) Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Riset dan Sumber Daya Manusia merupakan reviu Renstra Balitbang KP dan BPSDMP KP Tahun 2015 – 2019, sebagai turunan dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 25/PERMEN-KP/2015.

### 1. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi diatas, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan rencana kinerja dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2023. Sasaran dan tujuannya adalah:

- 1) Menyelenggarakan riset kelautan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Mempercepat pemanfaatan hasil riset lingkup internal Pusriskel dan *stakeholder* strategis lainnya;
- 3) Meningkatkan kompetensi Riset SDM kelautan yang mampu meningkatkan, nilai tambah dan daya saing kelautan secara optimal.

### 2. Sasaran

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Kegiatan BRSDM KP, Pusat Riset Kelautan kemudian menindaklanjutinya

dengan menyusun Peta Strategi Level II Pusat Riset Kelautan TA 2023 dalam kerangka *Balance Score Card* (BSC), yang telah disepakati antara Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balance Score Card*, Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Riset Kelautan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pusriskel

SK 1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP
SK 2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya target kinerja T.A 2023 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
		6. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78
		8. Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12. Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13. Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14. Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

Awal Tahun 2023, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM). Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra Pusat Riset Kelautan Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusat Riset Kelautan sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC).

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balance Score Card*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Pusat Riset Kelautan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan (SK) 1** dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP**, terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:
  - IKK 1: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK) dengan target 7. Merupakan nama

IKK baru dari IKK Hasil perumusan kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan) dengan target 7 dan target 8 pada tahun 2022, namun dihapuskan karena alih fungsi Riset, target 7 pada tahun 2021 dan 2020.

2. **Sasaran Kegiatan (SK) 2**, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan**, terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:
  - IKK 2: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit) dengan target 3, dan target 2 pada tahun 2022 (IK Baru ditahun 2022).
3. **Sasaran Kegiatan (SK) 3**, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan**, terdiri atas 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:
  - IKK 3: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta) dengan target 8,5 dan merupakan IK baru di tahun 2023.
  - IKK 4: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama) dengan target 3, tidak ada IKK ini di tahun 2022, dan target 26 dengan nama IKK Jejaring dan/atau kerjasama riset Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2021, target 26 pada tahun 2020
  - IKK 5: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%), dengan target 100 setiap tahun selama 2021-2024.
  - IKK 6: Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%), dengan target tahun  $\leq 0,5$  dan target  $\leq 1$  pada tahun 2022, 2021 dan 2020.
  - IKK 7: Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks), dengan target 78, target 76 pada tahun 2022 dan target 73 pada tahun 2021 dan target 72 di tahun 2020, target 82 pada tahun 2020.
  - IKK 8: Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai) dengan target 75 (merupakan IKK baru ditahun 2023).
  - IKK 9: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai), dengan target tetap 92, target 92 pada tahun 2022, dan target 87 pada tahun 2021 (merupakan IKK baru di tahun 2021).
  - IKK 10: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%), dengan target

92, target 86 pada tahun 2022, target 84 pada tahun 2021, dan target 82 di tahun 2020.

- IKK 11: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%), dengan target 75, target 70 pada tahun 2022, target 65 pada tahun 2021, dan target 60 di tahun 2020.
- IKK 12: Unit kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit) dengan target 1, dan target 1 pada tahun 2022 (merupakan IKK baru di tahun 2022).
- IKK 13: Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target 89, merupakan IKK baru ditahun 2023.
- IKK 14: Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target 82, merupakan IKK baru ditahun 2023.

## B. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

Pusriskel merupakan salah satu unit eselon II di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.





Gambar 4. Satker UPT Pusriskel

Cakupan organisasi Pusriskel meliputi: 1) Pusat Riset Kelautan; 2) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; 3) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan; dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Disamping itu juga terdapat 2 Instalasi (Instalasi Pengolahan Sumberdaya Air Laut Pamekasan dan Instalasi Laboratorium SATREPS Pasar Minggu) dan 1 Unit Ritisasi (PIAMARI Pangandaran), serta masih ada 1 calon UPT yaitu MIAMARI Morotai.

Pada awal tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah perubahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, yang mengakibatkan berubahnya komposisi jabatan dan juga beralihnya pegawai ke luar satuan kerja Pusat Riset Kelautan. Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Pusat Riset Kelautan pada Triwulan III Tahun 2023 total berjumlah 130 orang, yang terdiri dari 70 orang pegawai PNS dan 60 orang tenaga kontrak.

Disamping itu, Pusat Riset Kelautan juga didukung oleh adanya bengkel/workshop mekanikal, material, modeling, mekatronika serta *Authomatic Identification System (AIS)*, Aquarium sebagai bank coral dan ikan air, dan laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap.

## 2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengakibatkan beberapa hal antara lain:
  - a. Seluruh sumberdaya riset, baik sumber daya manusia, anggaran dan program riset berpindah ke BRIN;
  - b. Pusat Riset Kelautan tidak memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Riset lagi;
  - c. Pusat Riset belum bisa mengusulkan program dan kegiatan baru menunggu terbentuknya organisasi baru;
  - d. Program dan anggaran yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan rutin perkantoran berupa dukungan manajemen;
- 2) Belum optimalnya kolaborasi pemanfaatan hasil riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);
- 4) Pemanfaatan aset dan sarana prasarana eks-riset belum optimal;
- 5) Belum tersedianya regulasi pendukung serta terbatasnya kemampuan melakukan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset terdahulu untuk kebutuhan industri.

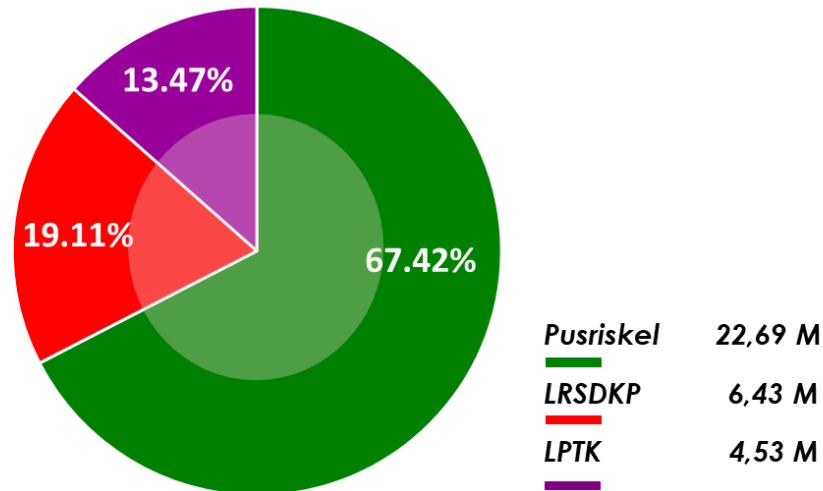
### C. Rencana Kerja Tahunan 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 menetapkan 1 program yaitu Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp. 33.650.000.000,- dengan rincian kegiatan:

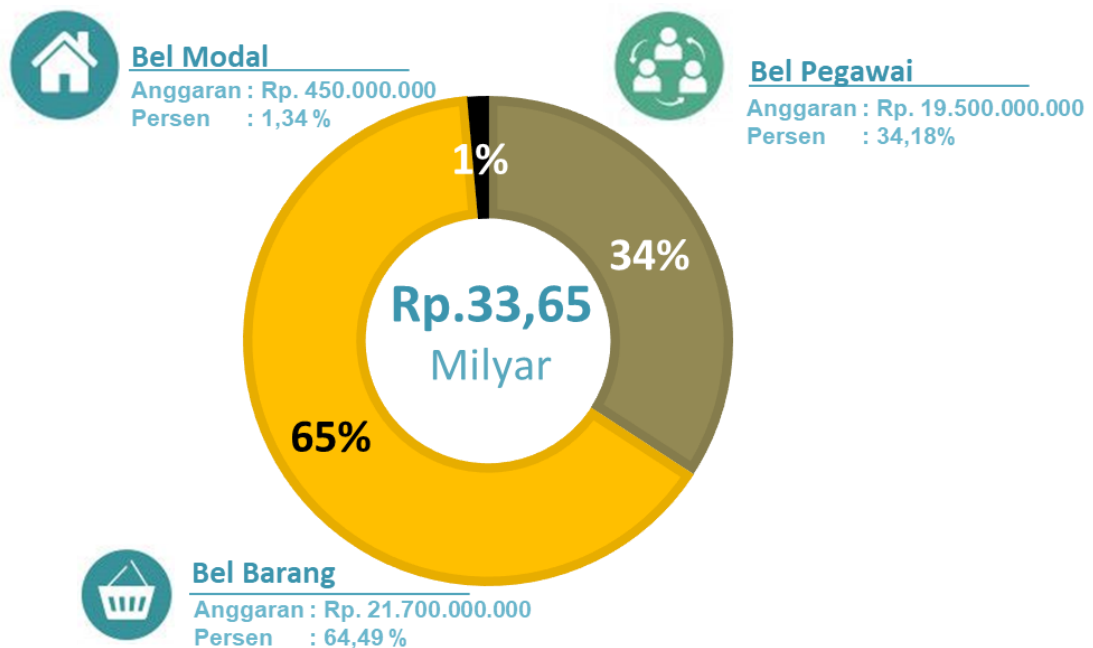
- 1) Hasil Perumusan Kebijakan, pagu sebesar Rp. 2.800.000.000,-
- 2) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, pagu sebesar Rp. 30.850.000.000,-

Rincian anggaran Pusat Riset Kelautan dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut

1. Pusat Riset Kelautan sebesar Rp. 22.687.649.000,-
2. Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir sebesar Rp. 6.429.852.000,-
3. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sebesar Rp. 4.532.499.000,-



Gambar 5. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023



Gambar 6. Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2023.

Berdasarkan postur anggaran Lingkup Pusriskel terlihat bahwa jenis belanja paling besar dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp. 21.700.000.000,- atau 64,49%; Belanja Pegawai sebesar Rp. 11.500.000.000,- atau 34,18% dan Belanja Modal sebesar Rp. 450.000.000,- atau 1,34%.

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pusat Riset Kelautan kepada Koordinator dan jabatan fungsional lingkup Pusat Riset Kelautan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja, serta sebagai dasar penilaian kegagalan/keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 telah ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) pada Januari 2023. Pada bulan April 2023 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja karena adanya pelantikan Kepala Pusat Riset Kelautan yang baru, namun tidak terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja baik indikator maupun target kinerja, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	3.	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78
		8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
		9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

## E. Pengukuran Kinerja

### a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pusriskel Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:



$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase capaian pada masing-masing indikator kinerja, dan akan diperoleh indeks capaian IKK.

Penghitungan indeks capaian IKK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;



Adapun status Indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Indeks Capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Scores Card* (BSC).

#### b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Penyusun Laporan Kinerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor: B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan 2023.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Penyusun Laporan Kinerja terdiri dari Kepala Satker UPT, Ketua Kelompok Kerja, Penanggung Jawab IKK dan staf Pusat Riset Kelautan. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Penyusun Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala Pusat Riset Kelautan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Tahun 2023 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan III Tahun 2023 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat

website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS).

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau/biru (buruk/sedang/baik/istimewa) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK

No.	Validitas IKK	Bobot
1.	Outcome	5
2.	Output Kendali rendah	3
3.	Output Kendali tinggi	2

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas Output Kendali Rendah yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator

Tabel 6. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Warna	Nilai
Istimewa	110 - 120
Baik	90 - < 110
Cukup	70 - < 90
Kurang	50 - < 70
Sangat kurang	< 50
Belum ada penilaian	

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 7. Standar Status Kinerja NPSS

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Sangat Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

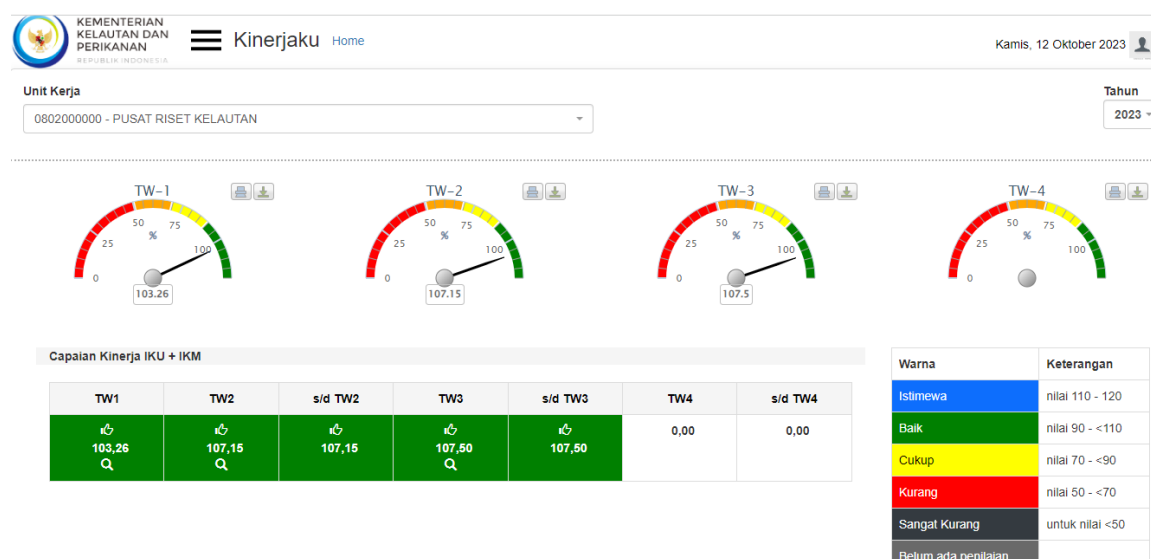


## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
Tahun 2023**
- B. Evaluasi dan Analisis Kinerja**
- C. Efisiensi Sumber Daya dan Alokasi Anggaran**
- D. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023**

## A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Riset Kelautan Triwulan III Tahun 2023 mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *Balanced Score Card* (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, ada indikator kinerja yang telah berhasil dicapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan III Tahun 2023 yang mengacu *Balanced Score Card* (BSC) dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Score Card* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Pusat Riset Kelautan di tingkat korporat Triwulan III Tahun 2023 sebesar 107,50% sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 8. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan III Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2023 dapat diketahui bahwa dari 14 IKK Pusat Riset Kelautan telah terdapat 3 capaian kinerja IKK sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau.

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) pada Triwulan III Tahun 2023, dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Riset Kelautan menunjukkan memiliki kinerja baik (diatas target yang telah ditetapkan), ditandai dengan warna hijau dan biru sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 8. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan III Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW III	TW III	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100,00	100
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	-	-	-
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	133,33	120
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75,00	100
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1	-	-	-
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	-	-	-
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan III Tahun 2023 yang mengacu *Balanced Score Card* (BSC) adalah sebagai berikut:

### **Sasaran Kegiatan 1**

**Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP**

#### **IKK 1: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)**

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan.

NSPK dapat berupa hasil pengkajian dan penelaahan terhadap peraturan yang akan disusun dengan melibatkan perancang Peraturan Perundang-undangan.

Belum terdapat capaian kinerja pada IKK ini, capaian akan diukur pada triwulan IV. Anggaran kegiatan dari IKK ini masih dalam status diblokir.

### **Sasaran Kegiatan 2**

**Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan**

#### **IKK 2: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)**

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan yang ditingkatkan berupa:

- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal Pusat Riset Kelautan
- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan dan mesin.

Belum terdapat capaian kinerja pada IKK ini, capaian akan diukur pada triwulan IV. Anggaran kegiatan dari IKK ini masih dalam status diblokir.

### **Sasaran Kegiatan 3**

**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan**

#### **IKK 3: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)**

Definisi: Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBPN adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progres sampai dengan triwulan III dapat dijelaskan sebagai berikut: PNBPN Pusriskel berasal dari Satker UPT Lingkup Pusriskel, yakni Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus dan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi. Sampai dengan Triwulan III dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.559.000 telah didapatkan PNBPN sebesar Rp. 33.190.216,- yang bersumber dari Sewa alat riset Satker LRSDKP sebesar Rp. 30.094.000,- dan sewa rumah negara Satker LPTK sebesar Rp. 3.096.216,-.

Pada triwulan III juga telah dilakukan beberapa kegiatan yakni:

- 1) Identifikasi aset yang dimiliki oleh satker LRSDKP; Inventarisasi kondisi aset satker LRSDKP; dan Potensi pemanfaatan aset satker LRSDKP untuk menghasilkan PNBPN;
- 2) Koordinasi dengan Sekretariat BRSDM mengenai percepatan penerbitan Surat Izin Penghunian Rumah Negara LPTK dan menginisiasi kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak luar untuk menghasilkan PNBPN.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 84,901,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 61,646,820,- atau sebesar 72.61%.



#### IKK 4: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan III adalah:

1. Menyelenggarakan 6th *Joint Coordination Committee Meeting* (JCCI and JCC), dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertemakan Pengelolaan Pengelolaan Ekosistem Karbon Hijau dan Biru Terintegrasi Untuk Tata Kelola Wilayah Daerah Aliran Sungai Berkelanjutan di Berau, Kalimantan Timur, serta Menyelenggarakan Simposium Nasional dengan tema *Integrated Clue Carbon Scosystem Management to Promote Indonesia's Blue Economy*
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tentang Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pasaman Barat, dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Balai Taman Nasional Wakatobi tentang Kerjasama penguatan fungsi Kawasan pelestarian alam dan konservasi keanekaragaman hayati melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pemulihan ekosistem terumbu karang dan pemberdayaan masyarakat sekitar pada Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Wakatobi.
3. Kunjungan lapang SFV untuk SFV Desa Parit, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
4. Pendampingan Pembekalan PK LPDP (TAP)
5. Pembahasan serah terima aset kerja sama Indonesia – Korea dari Pusriskel ke PRL
6. Koordinasi progres & evaluasi Kerjasama dan SFV Pusriskel
7. Pembahasan Dokumen Kerja Sama DJPRL dengan Pusat National University Korea untuk Pengembangan Kapal Sampah dengan Hidrogen
8. Pendampingan Kunjungan Kabadan ke PT. BMI dan TEFA Budidaya Ikan Politeknik KP Sidoarjo

9. Diskusi dengan penanggung jawab SFV UPT LPTK Wakatobi terkait dengan koordinasi dengan penyuluh dan pembuatan papan nama SFV yang dipasang di desa Liya Bahari dan Kantor LPTK Wakatobi

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 92,470,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 78,938,539,- atau sebesar 83.37%.

### IKK 5: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan meliputi Kegiatan Layanan Tata Laksana, Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan, Kegiatan Layanan Perkantoran, Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{Jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 100%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

SK-3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IK-5		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Riset Kelautan (%)							
Realisasi 2020 - 2022			2023					Renstra Pusriskel 2020-2024	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	Target	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	-	100	100	100	100	100	-	-	-

Pada Triwulan III Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2022 tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian pada IKK ini. Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena merupakan IKK baru di tahun 2021.

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh terlaksananya seluruh kegiatan dukungan manajemen internal di Pusat Riset Kelautan pada triwulan III, yakni: Kegiatan Layanan Tata Laksana; Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan; Kegiatan Layanan Perkantoran; Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, yang telah disampaikan dalam laporan kegiatan pada tabel berikut:

*Tabel 10. Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan III Tahun 2023*

No.	Laporan Layanan Dukungan Manajemen	Target TW III	Capaian TW III	% capaian
1.	Kegiatan Layanan Tata Laksana	3	3	100
2.	Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan	3	3	100
3.	Kegiatan Layanan Perkantoran	3	3	100
4.	Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	100
5.	Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3	3	100
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah Kegiatan Tata Laksana, yakni peneglolaan kegiatan BMN diantaranya kegiatan penyusunan rekonsiliasi keuangan dan BMN Semester I TA. 2023, opname barang persediaan periode Semester I TA. 2023, Reviu Laporan keuangan dan BMN Semester I TA. 2023 oleh Tim Reviu Itjen KKP, Penyusunan dan alporan Pengawasan dan pengendalian BMN Semester I. TA 2023, Persiapan dan Penyusunan RKBMN 2025, Input data revisi RKBMN 2023, Revisi RKABMN TA.2024.

Kegiatan Kesekretariatan Pimpinan, yakni Rapat Pimpinan (Rapim) rutin lingkup BPPSDM, menjadi Narasumber Webinar Nasional “Pengaturan Tata Ruang Wilayah Laut Indonesia” Fakultas Hukum UNDIP, Pembahasan MoA Kerjasama KKP dan PNU Korea, Wawancara dengan CTC terkait CTI CFF Capacity Building Road Map, Soft launching dan diskusi buku “Hot Water Rising: The Impact of Climate Change on Indonesia’s Fisheries and Coastal Communities”, Pembahasan rencana Workshop peningkatan kapasitas SDM Lab Karbon Biru, Mengikuti Rapat Delri Lintas K/L dalam rangka Penyusunan Kerpos Delri pada Pertemuan khusus FRWG CTI-CFF, Pembahasan Penyelesaian TL Rekomendasi LHP BPK RI untuk Pusriskel, dan Mengikuti Acara Kick Off Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan serta Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Pengalihan Hibah Pemerintah Korea Selatan dari BPPSDMKP kepada DJPKRL.

Kegiatan Layanan Perkantoran, yakni Mengajukan permohonan keperluan sehari hari perkantoran, mendaftarkan dan memverifikasi akun UMKM ataupun perusahaan melalui DIGIPAY, dan Konsultasi Pengoptimalan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) khususnya DIGIPay di KPPN VI Jakarta.

Kegiatan Kearsipan, yakni Melakukan rekap Surat masuk e-layar 211 dokumen, rekap Surat keluar 128 dokumen, rekap Surat keluar TTDE elayar 105 dokumen, Mengikuti Verifikasi Penilaian Instrumen Pengawasan Kearsipan di lingkungan KKP Tahun 2023, dan verifikasi arsip statis lingkup BRSDM, Melakukan Pengisian Form Penilaian RHAS dan LAKI Hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT KKP Tahap I tahun 2023, Memproses Arsip Vital Pusriskel untuk di Alih Medikan serta mengikuti Webinar Penilaian Usul Musnah Arsip 2023 Stasiun KIPM Palangka Raya dan Sosialisasi PERMEN KKP 42/2022 Tentang Tata Naskah Dinas Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Pengadaan barang dan jasa, yakni Mendaftarkan dan Membuat Surat Pesanan pada Aplikasi LPSE-EKatalog terkait Kontrak “Pemeliharaan Pagar Kaca Rooftop Gedung Riset MIAMARI”, Menghadiri Forum Group Discussion “Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4”, FGD Pengadaan Barang/Jasa dengan Tema “Praktek Serah Terima Pekerjaan Tidak Kompleks dengan *Quality Assurance*” dan FGD Pengadaan Barang/Jasa dengan Tema “Praktek Praktik Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa”.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 29,666,188,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16,888,949,139,- atau sebesar 56.93%.

#### **IKK 6: Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Pusat Riset Kelautan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Pusat Riset Kelautan tahun 2022.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan III adalah

1. Memproses tindak lanjut penyelesaian Alat Pengolah Data yang dibawa oleh Peneliti yang sudah pindah ke BRIN;
2. Menyusun bahan-bahan Pelaporan PITE, PUTIK dan PIPK;
3. Kordinasi kebutuhan dokumen SP2HL Hibah Korea (KMOUC) tahun 2015, 2017 dan 2019 untuk data dukung pemindahan kerjasama Korea ke Direktorat Jenderal PRL;
4. Menyiapkan data dukung penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam kegiatan bulanan Pusat Riset Kelautan;
5. Koordinasi dengan Tim Inspektorat dan Tim Setba terkait sisa temuan BPK pada Pembangunan MIAMARI & PIAMARI, PT. TGP dan meminta Tim Kerja Keuangan menyiapkan dokumen kelengkapan guna proses lebih lanjut dan Pengawasan Penerbitan Surat Paksa oleh KPKNL Jakarta II untuk PT. Pangkho;
6. Menyelesaikan formulir isian SPIP.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 116,852,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 94,888,891,- atau sebesar 81.20%.

### **IKK 7: Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Kelautan (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat

Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
  - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja.
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi:
  - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progres sampai dengan triwulan III dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengecekan dan Rekap Presensi Harian berdasarkan data SPT pegawai serta Konsultasi Permasalahan Presensi, Monitoring dan layanan administrasi Cuti Pegawai, dan Proses Surat keterangan lupa absen untuk perhitungan disiplin Pegawai;
2. Menindaklanjuti SK KPA Perubahan Kedua Tentang Penetapan PPNPN dan Honorariumnya Pusriskel TA 2023 yang telah di TTD;
3. Menginput Data Diklat/ Kursus Pegawai ke dalam SIMPEG;
4. Pengisian data dan pemenuhan kebutuhan SDM keuangan negara 2023-2028;
5. Rekap bukti lapor harta kekayaan seluruh PNS tahun 2022;
6. Pemenuhan Data Manajemen SDMA permintaan Itjen I untuk Pengawasan Kinerja Manajemen SDMA berupa: Pengisian Kuesioner Kenaikan Pangkat, Pengisian Daftar SK Pegawai yang mengalami perpindahan jabatan, Rekap pegawai pejabat fungsional yang belum bisa naik jabatan akan tetapi Angka kreditnya sudah terpenuhi, pemenuhan data MPH dan SKP 2017-2023; tanda terima laporan harta kekayaan pegawai;
7. Proses persiapan dan penerimaan pegawai PPPK-1 Agustus 2023, penyiapan dokumen kepegawaian dan keuangan yang diperlukan bagi PPPK;

8. Updating aplikasi yang berhubungan dengan IP ASN dan Pengelolaan SDMA (pegawai kkp, kinerja bkn, SI ASN BKN, elayar, aplikasi JF lainnya)
9. Updating untuk nilai IP ASN Pusat Riset Kelautan terbaru, yaitu 90,05 dari target 78

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 145,000,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 107,499,047,- atau sebesar 74.14%

### **IKK 8: Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)**

Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progres kegiatan sampai dengan triwulan III adalah terlaksananya kegiatan penataan dokumen SAKIP Pusriskel periode 5 tahun (2019-2023) dan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) SAKIP lingkup BRSDM dengan capaian nilai sementara PM SAKIP Pusriskel adalah sebesar 80,35 dan untuk nilai akhir PM SAKIP Pusriskel menunggu penyampaian resmi dari Biro Perencanaan KKP pada Triwulan IV Tahun 2023.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 278,860,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 237,482,272,- atau sebesar 85.16%.

### **IK 9: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)**

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:

- a) Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III

- b) Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- c) Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerja
- d) Aspek Ketepatan (A-IV): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKJ pada Aplikasi ESR dan penyampaian resmi kepada atasan langsung.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progres kegiatan sampai dengan triwulan III adalah:

1. Meng-upload dokumen SAKIP revisi April 2023 (PK, Renaksi, Rician Target IKU, LHE, SKP) ke Aplikasi ESR KemenPAN RB dalam rangka memenuhi permintaan bahan sebagai Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB;
2. Menyelenggarakan Rapat Persiapan Koordinasi Kegiatan Prioritas (SFV) TA 2023 Lingkup Pusriskel di Pamekasan dan Menyusun Draft Rancangan Koordinasi Kegiatannya;
3. Menyusun bahan Capaian Kinerja Level 2 Triwulanan Pusriskel sebagai bahan pada Pertemuan Pengukuran Capaian Kinerja Level 2 Triwulan III Tahun 2023 Lingkup BRSDM;
4. Merancang dan menyelenggarakan kegiatan Reviu LKj Triwulan II Tahun 2023 Level III UPT lingkup Pusriskel;
5. Menyusun Update Kertas Kerja PM Rekonsiliasi Kinerja Pusriskel Tahun 2023;
6. Reviu aspek kesesuaian Dokumen-dokumen Perencanaan (Revisi PK, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Rincian Target IKU) Level 3 UPT LRSDKP dan LPTK Triwulan III Tahun 2023 sebagai persiapan Assessment Penilaian Mandiri (PM) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2023.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 59,157,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 46,832,601,- atau sebesar 79.17%.



## IKK 10: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang di implementasikan di lingkup KKP pada Triwulan I dan II tahun 2023 menggunakan aplikasi [kinerjakp.bitrix24.com](http://kinerjakp.bitrix24.com).

- a) Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*;
- b) Komponen yang diunggah pada aplikasi *Bitrix24* diantaranya Laporan Kinerja Per Triwulan.
- c) Bobot Komponen Keaktifan diantaranya:
  - Konten dokumentasi **tulisan kegiatan** rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**;
  - Konten berupa karya **infografis poin 1**;
  - Konten berupa **Jurnal/video/campaign** diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup UPT BRSDM pada Triwulan III\* dan IV Tahun 2023 diantaranya

- Menggunakan Aplikasi (*Collaboration Office*) dengan alamat **portal.kkp.go.id**;
- Penghitungan keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan komposisi mendapatkan **4 poin**.
- Bobot nilai keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan sama dengan di TW I dan II;

Cara Mengukur Triwulan I dan II:

- a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*bitrix*)
- b) Menilai dua Komponen Dokumen (20%) dan Komponen Keaktifan (80%)
- c) Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (**Kepala UPT Lingkup BRSDM**)

**$TW I \text{ dan } TW II MP_{unit Level 2} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$**

**Hasil capaian pada TW II merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I dan II**

Cara mengukur **TW III\* dan IV:**

1. Menggunakan Aplikasi Manajemen pengetahuan dengan (*collaboration office*) [portal.kkp.go.id](http://portal.kkp.go.id)
2. Nilai maksimal komponen Keaktifan 4 poin



- Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (**Kepala UPT Lingkup BRSDM**)

$$TW\ III^* \text{ dan } TW\ IV\ MP_{Unit\ Level\ 2} = \text{Nilai Keaktifan/Target} * 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 92%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian IK Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 3			Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IK- 10			Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)						
Realisasi 2020 - 2022			2023					Renstra Pusriskel 2020-2024	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	Target	Target TW III	Realisasi TW III	% capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
93,38	97,57	99,68	92	92	133,33	120	33,67	82	108,70

Pada Triwulan III Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 133,33% dengan persentase capaian 144,92%, namun pada aplikasi kinerja tertera nilai maksimal yakni sebesar 120%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2022 terdapat kenaikan capaian sebesar 33,67% disebabkan adanya upaya monitoring penyampaian informasi yang dilaksanakan secara kontinyu setiap triwulan, dan terdapat kenaikan capaian bila dibandingkan dengan target jangka menengah yakni sebesar 108,70%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini adalah pemanfaatan sistem informasi (SI) atau media sosial dalam penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan KKP pada Aplikasi *Bitrix24* pada Triwulan I dan II, dan Aplikasi Manajemen pengetahuan dengan (*collaboration office*) [portal.kkp.go.id](http://portal.kkp.go.id) pada Triwulan III dan IV.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah keaktifan Kepala Satker/Kepala Pusriskel dalam membagikan kegiatan yang dilaksanakan pada pada SI-MP tersebut pada periode Januari-September 2023.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 194,381,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 118,452,269,- atau sebesar 60.94%.

## IKK 11: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pusat Riset Kelautan Yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Pusat Riset Kelautan.

Formula perhitungan IK ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 75%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 12. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IK- 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan Yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)							
Realisasi 2020 - 2022			2023					Renstra Pusriskel 2020-2024	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	Target	Target TW II	Realisasi TW III	% capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
100	100	100	75	75	75	100	-25	-	-

Pada Triwulan III Tahun 2023 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 75% rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan disampaikan, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2022 terdapat penurunan capaian sebesar 25 % dikarenakan adanya perubahan dalam penyampaian nilai capaian, namun secara nilai capaian tidak terdapat penurunan capaian. Pada tahun 2022 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya ataupun satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama yakni 100%. Pada tahun 2023 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 75%.

Faktor keberhasilan capaian IKK ini adalah tidak adanya temuan pada Pusat Riset Kelautan pada Triwulan III Tahun 2023, sesuai surat penyampaian dari BRSDM Nomor B.6905/BRSDM.1/HP.520/X/2023 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BK atas Laproan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah

Rekomendasi hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja KKP”

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 32,907,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6,334,614,- atau sebesar 19.25%.

### **IKK 12: Unit kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan III adalah:

1. Pembimbingan Mahasiswa Magang/PKL: asistensi laporan magang dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2023 dari Universitas Bina Sarana Informatika Program Studi Ilmu Komunikasi dan Bahasa;
2. Pembuatan caption dan postingan di akun Instagram milik Pusriskel;
3. Membuat SOP: a. Pelayanan Magang, b. Keselamatan dan Keamanan Laboratorium, (mencakup pada tata tertib selama berada di laboratorium), c. Penggunaan Alat dan Peminjaman Laboratorium (menerangkan tata cara peminjaman alat, laboratorium dan bahan yang ada untuk pihak eksternal) di Satrep Pasar Minggu;
4. Penulisan Paper untuk Jurnal Publikasi Q1;
5. Penyusunan Laporan PPID Pusriskel TW III;
6. Pembuatan desain plang nama kegiatan/papan nama kegiatan SFV.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 70,000,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 54,535,883,- atau sebesar 77.91%.

### IK 13: Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (Nilai)

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

**Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran** dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ; (b) Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ; (c) Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA  $< 70$ .

Formula perhitungan:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan III adalah:

1. Memproses SPJ pembayaran dan SPBy dari penggunaan dana UP
2. Input data PPPK ke aplikasi gaji;
3. Melakukan Verifikasi, Validasi, OTP SPP Pemeliharaan, Tukin, Uang Makan, Penggantian Uang Persediaan, Perjalanan Dinas, SPJ;
4. Finalisasi SOP Keuangan;
5. Mengusulkan revisi anggaran Tim Kerja Keuangan;
6. Koordinasi dengan Pusat Riset Perikanan terkait dengan Penginputan Data Pajak;
7. Melaksanakan pertemuan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pusriskel Triwulan IV;
8. Menyusun Justifikasi Deviasi Halaman III DIPA Satker Pusriskan.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 50,424,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 49,686,900,- atau sebesar 98.54%.

#### **IKK 14: Nilai Kinerja Anggaran satker Pusat Riset Perikanan (Nilai)**

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada prKogram Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila  $\leq 50$

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan III adalah:

1. Pengumpulan data/bahan dan pembuatan laporan realisasi lingkup Pusat Riset Kelautan;
2. Koordinasi dengan operator Aplikasi Sakti dan bendahara pengeluaran;
3. Pembuatan presentasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran;
4. Pembuatan dokumentasi rapat hasil evaluasi dan tindak lanjut BPK-RI;
5. Koordinasi dan pembuatan laporan Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III 2023;

6. Revisi pembuatan infografis SOP Tim Kerja Keuangan.

Pagu anggaran kegiatan IKK ini adalah sebesar Rp. 58,860,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 52,003,853,- atau sebesar 88.35%.

### C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

Penyerapan anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan Triwulan III Tahun 2023 data per tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp. 17,797,250,828,- dari pagu anggaran Rp. 33,650,000,000,- dengan persentase sebesar 52.89%, rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Triwulan III Tahun 2023

Satuan Kerja (Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
Pusriskel	22,687,649,000	10,942,449,050	48.23%
LRSDKP	6,429,852,000	3,810,000,783	59.25%
LPTK	4,532,499,000	3,044,800,995	67.18%
<b>TOTAL</b>	<b>33,650,000,000</b>	<b>17,797,250,828</b>	<b>52.89%</b>



Secara umum kinerja pengelolaan anggaran Pusat Riset Kelautan pada Triwulan III Tahun 2023 belum maksimal hal ini terlihat dari capaian realisasi anggaran yang masih dibawah 75%, dikarenakan adanya blokir anggaran belanja modal dan kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan, serta belum terlaksananya seluruh kegiatan berdasarkan POK. Realisasi anggaran per IKK dapat dilihat pada lampiran sedangkan realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 14. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023*

SASARAN KEGIATAN		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Per 30 Juni (Rp.)	%
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	2,350,000,000	0	0
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	450,000,000	0	0
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	30,850,000,000	17,797,250,828	52.89
<b>TOTAL</b>		<b>33,650,000,000</b>	<b>17,797,250,898</b>	<b>52.89</b>

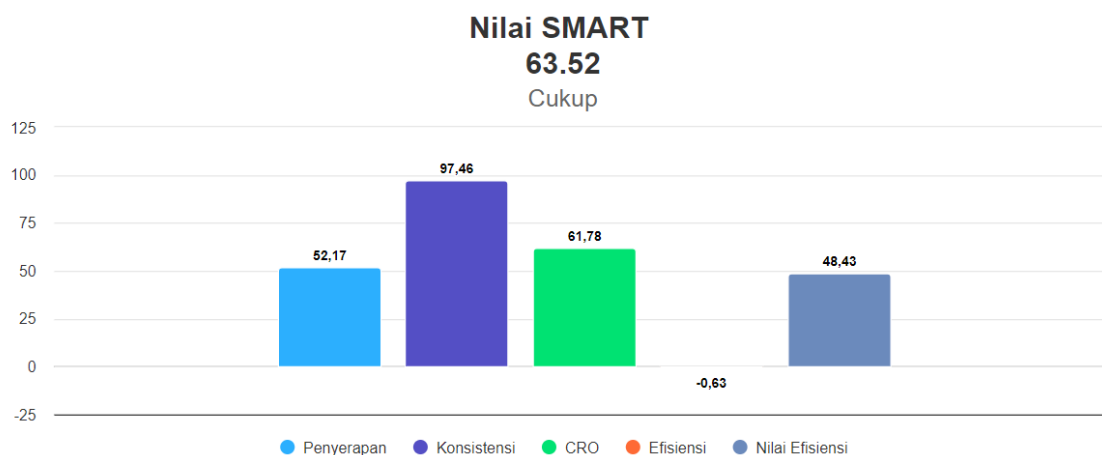


## D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

Pusat Riset Kelautan merupakan satuan kerja di bawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Nilai efisiensi tertinggi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah -20 % (minus dua puluh persen). Perhitungan efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan yang masuk dalam DIPA Pusat Riset Perikanan (satu DIPA) telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi SmartDJA, yang dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 9. Nilai Efisiensi anggaran Triwulan III Tahun 2023

Tabel 15. Perhitungan Efisiensi Anggaran Pusat Riset kelautan

Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
52,17	97,46	61,78	- 0, 63	48,43	63,52

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan pada Triwulan III Tahun 2023 memperoleh skor – 0,63% sedangkan nilai efisiensinya sebesar 48,43. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20% sampai dengan -20%, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Perhitungan efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan masuk dalam DIPA Pusat Riset Perikanan (satu DIPA). Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 52,17% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 61,78%.

Terdapat beberapa output dengan capaian diatas 100%, yaitu:

- a) IKK 5 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%), target 100% tercapai 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- b) IKK 10 Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar Pusat Riset Kelautan (%), target 92 %, tercapai 133,33% dengan persentase capaian sebesar 120%.

- c) IKK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%), target 75% tercapai 75% dengan persentase capaian 100%.

# **BAB IV PENUTUP**

**A. Capaian Kinerja Utama**

**B. Permasalahan & Rekomendasi**



## A. Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran Aplikasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023, Pusat Riset Kelautan memiliki kinerja yang baik dengan nilai sebesar 107,50% dan indikator capaian kinerja berwarna hijau. Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Score Card* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan indikator capaian berwarna hijau.

Dari hasil pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan III Tahun 2023 terdapat 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah memiliki capaian sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan III Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW III	TW III	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100,00	100
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	-	-	-
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	133,33	120
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75,00	100
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1	-	-	-

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW III	TW III	%
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	-	-	-
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

## B. Permasalahan dan Rekomendasi

Capaian kinerja Pusat Riset Kelautan selama Triwulan III Tahun 2023 sudah baik (diatas 100%) dan dicerminkan dengan indikator berwarna hijau, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. IKU dengan Capaian Triwulan Melampaui Target Tahunan  
Terdapat 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan. Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.
2. IKU dengan Target Tahunan  
Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa target kinerja akhir tahun yang telah ditetapkan dapat dicapai.

# LAMPIRAN



## Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET KELAUTAN

JALAN PASIR PUTIH II LANTAI IV ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [pusriskel@kkp.go.id](mailto:pusriskel@kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**  
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**  
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Pusat Riset  
Kelautan

  
Yayan Hikmayani



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78
		8	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

### Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	2.800.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	30.850.000.000
<b>TOTAL ANGGARAN PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023</b>		<b>33.650.000.000</b>

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radjarta

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Pusat Riset  
Kelautan

Yayan Hikmayani

### Perjanjian Kinerja Revisi April 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendra Yusran Siry**  
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**  
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Kepala Pusat Riset Kelautan

  
Hendra Yusran Siry

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78
		8	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

### Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	<i>2.800.000.000</i>
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	<i>30.850.000.000</i>
<b>TOTAL ANGGARAN PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023</b>		<b>33.650.000.000</b>

Jakarta, 17 April 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Kepala Pusat Riset Kelautan

  
Hendra Yusran Siry

## Surat Perintah Tim Penyusun LKJ Tahun 2023



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

#### SURAT PERINTAH

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN  
NOMOR :B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023

#### TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)  
PUSAT RISET KELAUTAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean governance* dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan dan Tahunan.

b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT PERINTAH PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kepala Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :  
Memberikan pembinaan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;
  2. Ketua :  
Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

3. Sekretaris :  
Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;
4. Anggota :  
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.

- KETIGA** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023, bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan.
- KEEMPAT** Masa kerja berlaku Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.
- KELIMA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 Nomor SP DIPA 032.12.403821/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Maret 2023

PLT KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN





LAMPIRAN : Surat Perintah PLT. Kepala Pusat Riset Kelautan Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)  
PUSAT RISET KELAUTAN  
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan  
Ketua : Dr. Ifan Ridlho Suhelmi, M.Si.  
Sekretaris : Joko Hardono, S.Si, ME.  
Anggota : Erish Widjanarko, S.T.  
Triyono, S.Si, M.T.  
Theresia Lolita N., M.Si.  
Nia Naelul Hasanah R., M. Soc.,Sc.  
Efi Noferya, S.Pi.  
Rais Rozali, S.H, M.H.  
Arid Ahmad Ridwan, SE.  
Yulhendri Suryansyah, S.Pi, M.Si  
Dr. Niken F. Gusmawati, M.Si.  
Dra. Yayah Shobariyah  
Drs. B. Realino S, M.Si.  
Falia Maumentia, LL.M.  
Cecep Ahmad H, S.T, M.Eng.  
M. Hikmat Jayawiguna, S.St.Pi, M.Si.  
Sitti Khadijah Nurhappy, S.Pi, M.T.  
Donal Daniel, S.T, M.T.  
R. Tri Anggono T. Pranoto, A.Md.  
Adi Darmawan, S.Kom.  
Sari Novita, S.T.  
Utami Retno Kadarwati, M.Sc.  
Megananda, SE

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



## Realisasi Anggaran Per IKK Pusat Riset Kelautan

Per 30 September 2023


No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Persentase (%)
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	2,350,000,000	-	0.00%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	450,000,000	-	0.00%
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	84,901,000	61,646,820	72.61%
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	92,470,000	78,938,539	85.37%
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	29,666,188,000	16,888,949,139	56.93%
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan	116,852,000	94,888,891	81.20%

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Persentase (%)
		dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)			
7		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	145,000,000	107,499,047	74.14%
8		Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	278,860,000	237,482,272	85.16%
9		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	59,157,000	46,832,601	79.17%
10		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	194,381,000	118,452,269	60.94%
11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	32,907,000	6,334,614	19.25%
12		Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	70,000,000	54,535,883	77.91%
13		Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	50,424,000	49,686,900	98.54%



No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Persentase (%)
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	58,860,000	52,003,853	88.35%
<b>TOTAL</b>				<b>33,650,000,000</b>	<b>17,797,250,828</b>	<b>52.89%</b>





Komplek Bina Samudera  
Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur  
Gedung BRSDMKP 2 Lantai 4-5  
Jakarta Utara 14430